

**Analisis yuridis terhadap *ratio decidendi*
hakim mahkamah agung dalam membatalkan
putusan *judex factie* yang tidak memuat
surat dakwaan dan implikasinya terhadap
status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no.
607 k/pid/1985)**



S K R I P S I

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Budiaji Agung Wicaksono

E.1106100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI*
HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN
PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT
SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NO. 607 K/PID/1985)**

Disusun Oleh :

BUDIAJI AGUNG WICAKSONO

NIM : E1106100

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing

KRISTİYADI, S.H., M.Hum.

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI*
HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN**

**PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT
SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NO. 607 K/PID/1985)**

Disusun oleh :

BUDIAJI AGUNG WICAKSONO

E 1106100

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 September 2010

TIM PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :

Ketua

2. Edy Herdyanto S.H., M.H. :

Sekretaris

3. Kristiyadi, S.H., M.Hum. :

Anggota

MENGETAHUI

Dekan

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Budiaji Agung Wicaksono

NIM : E 1106100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) “ANALISIS
YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH AGUNG

DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NO. 607 K/PID/1985)” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum skripsi dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2010
yang membuat pernyataan

Budiaji Agung Wicaksono
NIM E1106100

MOTTO

Wahai manusia...engkau telah datang kedunia ini dalam keadaan menangis sementara orang-orang menyambutmu dengan senyum kebahagiaan...maka bekerjakeraslah selama hidupmu, berbuat baiklah, tolonglah sesamamu, dan mengabdilah sepenuhnya kepada sang Khaliq.dengan cara seperti ini lah engkau

bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum...sementara orang-orang disekitarmu menangis sedih karena telah ditinggalkan oleh orang yang paling bermakna dalam kehidupannya.

(Iman Supriyono)

“Never lose your faith, Accept your fate and don’t reject your own life”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Setelah sekian lama aku menimba ilmu, namun hanya kado kecil ini yang dapat kuhadiahkan dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas ingin penulis persembahkan kepada :

1. *Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya*
2. *Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan penulis dalam mengarungi hidup ini*
3. *Kedua Orangtua Ku tercinta Bapak Ngadimin,S.H dan Ibu Saptatiningsih*
4. *Adek-AdekQ tersayang "Dimas dan Helda"*
5. *Kakek dan Nenek Ku tercinta*
6. *Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya*
7. *Cinta Q "yang entah ada dimana"*
8. *Sahabat-Sahabatku dimanapun berada*
9. *Teman-temanQ angkatan 2006 FH UNS*
10. *Almamterku, Universitas sebelas Maret Surakarta.*

ABSTRAK

BUDIAJI AGUNG WICAKSONO, E1106100. 2010 “ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NO. 607 K/PID/1985)” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Bagaimanakah *Ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasi putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim mahkamah agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, Dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama *Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan, meliputi: Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung mengesampingkan proses pemeriksaan terhadap pengaduan Naga Budiman yang belum selesai dilakukan baik dari lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan, hasil pemeriksaan Mahkamah Agung dalam dakwaan primair menyatakan bahwa terdakwa tetap dianggap melanggar bunyi Pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Di mana dalam hasil pemeriksaan tersebut terdakwa Naga Budiman dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang Benny S. Indradjaja sehingga kehormatan yang bersangkutan terserang. Kedua, Implikasi putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim Mahkamah Agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik. Hal ini akibat adanya pembatalan demi hukum atas Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Nomer 607/K/Pid/1985

Kata kunci : *RATIO DECIDENDI*, *Judex Factie* dan Surat Dakwaan

ABSTRACT

BUDIAJI AGUNG WICAKSONO, E1106100, 2010 “A JURIDICAL ANALYSIS ON THE RATIO DECIDENDI OF SUPREME COURT’S JUDGE IN CANCELING THE JUDEX FACTIE VERDICT NOT CONTAINING ACCUSATION DOCUMENT AND THE IMPLICATION TO THE STATUS OF THE ACCUSED IN GOOD REPUTATION VILIFICATION CASE (A STUDY ON THE VERDICT NO. 607 K/PID/1985)”. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out how the ratio decidendi of supreme court’s judge is in canceling the judex factie verdict not containing accusation document and the implication of judex factie verdict to the status of the accused.

This study belongs to a normative law research that is prescriptif in nature, with qualitative approach intended to comprehend the phenomenon about what the subject of research experiences. The type of data employed was the secondary one. The secondary data source employed included primary, secondary and tertiary law materials. Technique of analyzing data employed by the writer was the qualitative analysis one with an interactive model of analysis carried out by means of interaction, either among the components or by data collection process in the cycle-form process.

Considering the discussion, two following conclusion can be drawn: firstly, the Ratio decidendi of Supreme Court’s judge in canceling the judex factie verdict not containing the accusation document includes: the Supreme Court in hearing the kasasi (appeal to the supreme court) to Bandung First Instance Court’s verdict overrides the examination process of Naga Budiman indictment that has not been completed both from the Police institution and Public Prosecutor Office, the result of Supreme Court’s examination on the premier accusation states that the accused remains to be considered as violating the Article 317 clause (1) of Penal Code. In such result of examination, the accused Naga Budiman deliberately files indictment or false information to the authority, both written or to be written about Benny S. Indradjaya so that his respect is attacked. Secondly, the implication of judex factie verdict canceled by the judge of Supreme Court because not containing the accusation document against the status of the accused, that the accused is stated evidently committing the good reputation vilification. It is as a result of the presence of cancellation for the sake of law over Bandung First Instance Court based on the Supreme Court’s examination on the kasasi with the decision number 607/K/Pid/1985.

Keywords: *Ratio Decidendi*, *Judex Factie*, and Accusation Document

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semata alam atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NO.607 K/PID/1985)**

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan hukum ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Ibu Siti Warsini, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi nasehat dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara. Yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan membrikan ilmu-ilmu tentang hukum acara pidana..
5. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.
6. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana.
7. Bapak Harjono, S.H, M.H selaku ketua program non reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala bimbingannya kepada seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Kedua Orangtua Ku Bapak Ngadimin,S.H dan Ibu Saptatiningsih yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, jirih payahnya dalam bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan penulis sampai saat ini. Bapak, Ibu, ku takkan mengecewakanmu dan ku berjanji akan membahagiakan mu sampai akhir hayat.
11. Adik-Adikku (Dimas dan Helda) yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam mengarungi hidup ini.
12. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil.
13. Kuda Besi ku yang menemaniku sepanjang perjalanan suka maupun duka.

14. Teman-teman kuliah seperjuanganku Abi, Jeffry, Anung "jumadi", Rodhi" bocil", Entut, Yadi, Gembong, GRD, Diger, Gepeng, Etika, Lely, Deden, Ririn, Berlian, Dina, Sari, Kum-Kum, Ajib, Galih, Kino, Topek, Pasukan 30, eks the Children Under Garden dan Filo fc yang telah membantu selama kuliah, menyelesaikan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan candatawa baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna
15. Teman-teman sepermainan ipik, petuk n crew coustercattle, hoofd awesome, carment, bad hair day, citro, No Stereo Yellow, Sriwedari boots bois, ticka, Flo, Savior, Sandra, DePe makasih telah membantu dan telah berbagi bersama dalam suka maupun duka
16. Crew pengaman parkir FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit, Mas Eko dan Mas Bimo yang selalu setia bercanda gurau dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hukum di Indonesia dan bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, 25 Juli

2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Ratio Decidendi</i>	10
a. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	10
b. Pertimbangan <i>Ratio Decidendi</i> yang bersifat yuridis	10
c. Pertimbangan <i>Ratio Decidendi</i> yang bersifat non yuridis.	12
2. Tinjauan Umum Tentang Hakim Mahkamah Agung	12
a. Pengertian Hakim.....	13
b. Kewajiban dan Tanggung jawab Hakim.....	13
c. Pengertian Mahkamah Agung.....	14
d. Wewenang Mahkamah Agung.....	14

3. Tinjauan umum Tentang <i>Judex Factie</i>	15
a. Pengertian <i>judex factie</i>	15
4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan.....	16
a. Pengertian Surat Dakwaan	16
5. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa	18
6. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	19
B. Kerangka Pemikiran	24
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Agung Dalam membatalkan Putusan <i>Judex Factie</i> yang tidak memuat surat dakwaan.....	26
B. Implikasi Putusan <i>judex factie</i> yang dibatalkan Hakim Mahkamah Agung karena tidak memuat Surat Dakwaan	43
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	47
B. Saran	48
 DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik.

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi.

Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal – pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 124, 136, dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi. atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. (Diah Lestari.P. dan Theodora YSP (Divisi Riset MaPPI FHUI), “*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*”, <http://www.pemantauperadilan.com>, tanggal 7 Desember 2005).

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal yang sama, konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) beragam wujudnya. Antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah.

Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. (Brian Prastyo, “*Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*”, <http://staff.blog.ui.edu>.)

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Dalam perkara pencemaran nama baik disini yang tidak memuat surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum sehingga terdakwa merasa dirugikan karena tidak tahu tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Dalam hal ini penerapan hukum putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan terhadap perkara pencemaran nama baik ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Sehingga terdakwa berupaya untuk mengajukan kasasi agar mendapatkan kepastian hukum yang sebenar-benarnya. Dimana putusan

kasasi disini membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan. Sehingga bagaimana implikasi putusan kasasi terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik ini.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN *JUDEX FACTIE* YANG TIDAK MEMUAT SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS TERDAKWA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NO. 607 K/PID/1985)”

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas.

Perumusan masalah juga akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah *Ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan ?
2. Apakah implikasi putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim mahkamah agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu terget yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan
 - b) Untuk mengetahui putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim mahkamah agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa
2. Tujuan Subyektif
- a) Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam prakteknya.
 - b) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b) Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006:44).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menemukan suatu kebenaran dan menarik suatu kesimpulan dari isu-isu hukum yang ada untuk menemukan aturan-aturan yang relevan sesuai Peter Mahmud Marzuki.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Johnny Ibrahim, 2006:300). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu menganalisis *ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (studi putusan no. 607 k/pid/1985) serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.

4. Sumber bahan hukum

Untuk menyelesaikan penelitian hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Sumber primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud, 2005:141)

5. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum sekunder saja, bahan hukum sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundanga-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan No 607 K/Pid/1985.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi., Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
- c) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. diantaranya :
 - 1) mail.kaskus.us/showthread.php?t=912738
 - 2) Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, "*Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*", www.hukumonline.com tanggal 30 Mei 2005.
 - 3) Brian Prastyo, "*Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*", <http://staff.blog.ui.edu>.

- 4) Diah Lestari.P. dan Theodora YSP (Divisi Riset MaPPI FHUI),
“Ganti Kerugian dan Rehabilitasi”,
<http://www.pemantauperadilan.com>, tanggal 7 Desember 2005;

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang Analisis

yuridis terhadap *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (studi putusan no.607 k /pid/1985)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang Analisis yuridis terhadap *ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (studi putusan no.607 k /pid/1985)

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi*

Pengertian *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- (c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- (d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan

memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana..

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan (Rusli Muhammad, 2007: 212-220).

2. Tinjauan Umum Tentang Hakim Mahkamah Agung

a) Pengertian Hakim

Yang dimaksud Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud dengan “mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim, untuk menerima, memeriksa memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 1 ayat (9) KUHAP). Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

b) Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban :

- 1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 28 ayat (1))
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” (Pasal 28 ayat (2))
- 3) Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan hakim ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, penasehat hukum, atau panitera (Pasal 29 ayat (2)).
- 4) Hakim ketua sidang, hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera yang masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, wajib pula mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat (3)).
- 5) Sebelum memegang jabatan hakim diwajibkan bersumpah dan berjanji menurut agamanya (Pasal 30).

Sedangkan yang berisi tanggung jawab hakim yaitu bahwa ”Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1)).

c) Pengertian Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa di dalam Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat lingkungan peradilan yakni badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hakim dan keadilan.

Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

d) Wewenang Mahkamah Agung

Pasal 20 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang-undang
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Di dalam Pasal 31 UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang :

- 1) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 2) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

3. Tinjauan Umum tentang Putusan *Judex Factie*

a) Pengertian *judex factie*

Istilah *judex factie* yang artinya adalah Hakim Fakta, yang dimaksud Hakim Fakta atau *judex factie* adalah hakim yang memeriksa perkara secara langsung dipersidangan. Sedangkan Putusan *judex factie* adalah putusan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. *Judex facti* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Di Indonesia, peran *judex facti* ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Fungsi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah hakim melakukan

pemeriksaan terhadap fakta-fakta untuk menemukan bukti-bukti sebagai dasar putusannya.

4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

a) Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut (Harun M.Husein, 1994:186-187)

Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara kongkrit atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana pada waktu dan tempat tertentu. Pentingannya surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap dakwaan tersebut. (Harun M.Husein, 1994)

Syarat-syarat sahnya surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat 2 KUHP yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formil dan materiil syarat formil antara lain:

- 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum sebagai pembuat surat dakwaan
- 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sedangkan syarat materiil yaitu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. apabila syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan agung RI, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain :

- 1) Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak nebis in idem.
- 2) Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- 3) Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan oleh penyidik. Dengan catatan bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum tersebut pembuktiannya dapat didukung oleh hasil penyidikan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHP, penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan, dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan.

KUHAP tidak membatasi ruang lingkup perubahan surat dakwaan, hanya membatasi soal waktu saja. Dalam kaitan antara pasal 144 dan pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka materi perubahan surat dakwaan dapat meliputi:

- 1) Perbaikan atau perubahan pada syarat formil dan materiil
- 2) Perubahan pada bentuk atau sistematik dakwaan
- 3) Perubahan pada redaksi surat dakwaan
- 4) Penyempurnaan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman.

5. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa

Pengertian Terdakwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa seorang terdakwa memiliki hak-hak, antara lain hak-hak terdakwa adalah :

- a) Hak segera diadili oleh pengadilan
- b) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan.
- c) Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sesuai dalam Pasal 177 KUHAP.
- d) Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- e) Hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- f) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya.
- g) berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- h) Hak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- i) Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian.

- j) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

6. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik

- a) Pengertian Pencemaran Nama baik Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel.

b) Pencemaran Nama Baik Menurut Pakar Hukum

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

- 1) menista secara lisan
- 2) menista dengan surat/tertulis
- 3) memfitnah
- 4) penghinaan ringan
- 5) mengadu secara memfitnah
- 6) tuduhan secara memfitnah

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita, dinista, dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan

instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya bukan perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti : Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia). Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista / menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) diatas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada Pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. (R. Soesilo, 1996:225)

Menurut Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti

yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bias membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal-pasal dalam Bab XVI Buku I KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

- 1) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- 3) Penghinaan terhadap segolongan penduduk / kelompok / organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- 4) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- 5) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berkaitan dengan “pencemaran nama baik” juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 36 ayat (5) menyebutkan bahwa;

Isi siaran dilarang :

- 1) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong
- 2) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan
- 3) narkoba dan obat terlarang; atau
- 4) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

dan UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, “*Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*”, www.hukumonline.com tanggal 30 Mei 2005.)

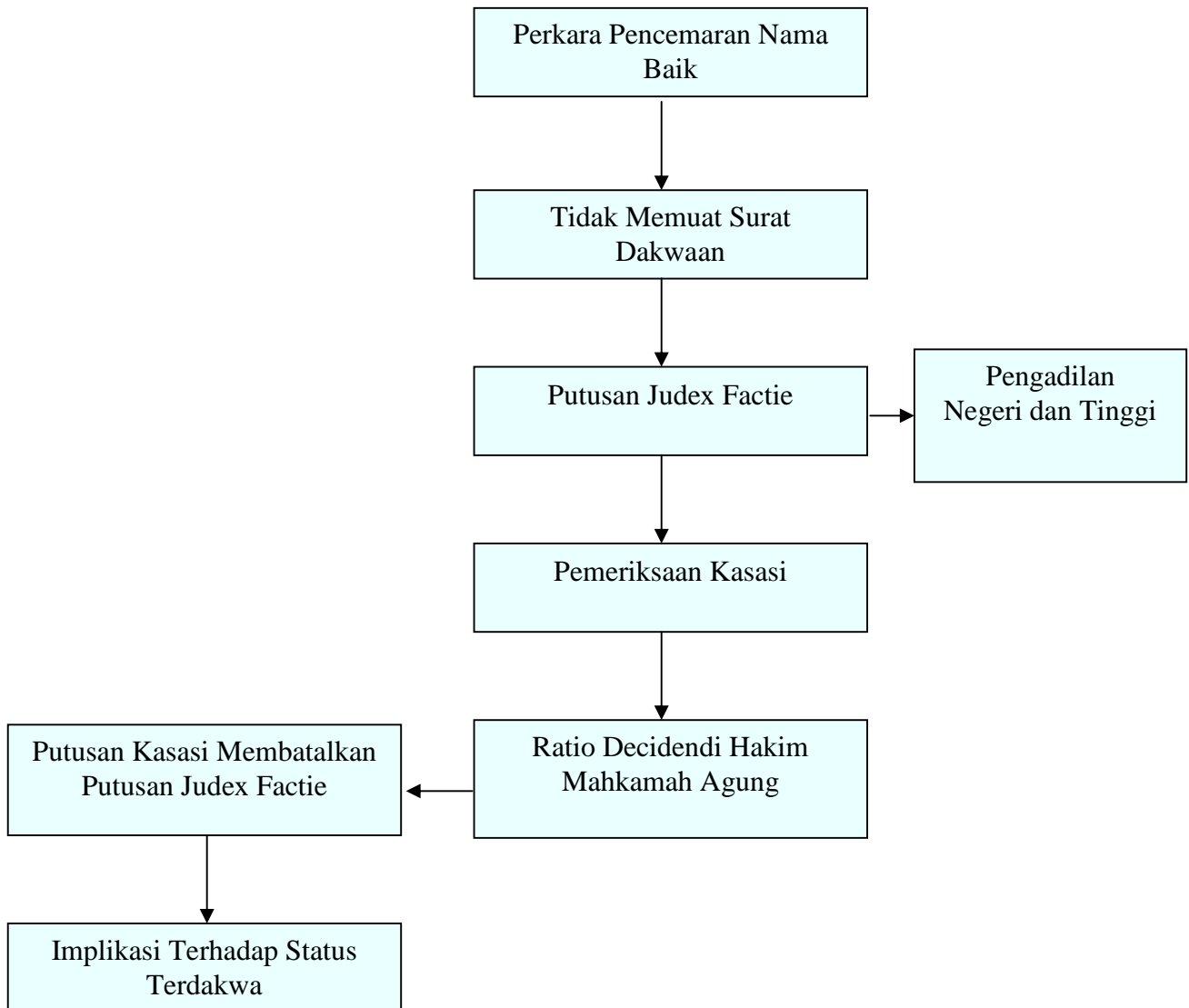
- c) Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan. Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP

Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal*-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan / penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Berdasarkan skema diatas maka dapat dijabarkan uraian penjelasan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Berdasarkan tahap-tahap pemeriksaan ditingkat peradilan di Indonesia, maka pemeriksaan perkara pencemaran nama baik pertama mulai ditingkat *judex factie* yaitu pemeriksaan oleh peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) kemudian dilanjutkan pemeriksaan banding oleh pengadilan Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Dimana hakim Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta hukum dari perkara tersebut namun memeriksa apakah penerapan hukumnya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara pencemaran nama baik yang tidak memuat surat dakwaan diatas, hakim Mahkamah Agung memeriksa apakah penerapan hukum dari putusan yang diambil oleh *judex factie* sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka hakim Mahkamah Agung dengan *ratio decidendi* dalam putusan kasasi akan membatalkan putusan *judex factie* tersebut. Setelah putusan *judex factie* dibatalkan dengan putusan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung maka akan berimplikasi terhadap status terdakwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan *Judex Factie* yang tidak Memuat Surat Dakwaan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

a) Identitas terdakwa

Nama : Naga Budiman
Umur : 52 Tahun
Lahir : Bandung
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : pedagang
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan pasir kaliki No.52 Bandung

b) Kasus Posisi

Pada bulan April Naga Budiman mengadukan Benny S. Indradjaja ke Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Bandung yang menuduh bahwa telah menjelek-jelekkan dan telah melakukan korupsi di PT.Ganatex. Atas laporan tersebut Benny S. Indradjaja diperiksa oleh pihak Kepolisian, setelah pemeriksaan dilakukan Benny S. Indradjaja pada tanggal 16 November 1982 datang ke Kepolisian Kota Besar Bandung untuk menanyakan hasil pemeriksaan atas dirinya. Kemudian hasil dari pihak Kepolisian Bandung bahwa perkara Benny S. Indradjaja tidak dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti. Sebelum pemeriksaan Kepolisian terhadap Benny S. Indradjaja selesai, Naga Budiman pada tanggal 15 November 1982 mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung sebagai kelanjutan atas laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Benny S. Indradjaja dengan

tembusan Instansi pemerintah dan lain-lain. Namun laporan kelanjutan tersebut tidak dibalas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung karena pelaporannya tidak relevan walaupun Kejaksaan membalas surat tersebut kepada Naga Budiman, jelas Naga Budiman telah membuat atau mengirim surat tersebut yang isinya tidak benar atau palsu. Kemudian Benny S. Indradjaja melaporkan balik Naga Budiman karena dugaan memberikan Keterangan palsu dan Pencemaran Nama Baik. Kemudian Benny S. Indradjaja dipanggil oleh POLTABES Bandung untuk menjadi saksi di Persidangan terhadap terdakwa Naga Budiman. Didalam persidangannya terdakwa Naga Budiman didakwa dengan dakwaan primair (pasal 317 ayat 1),subsidiar (pasal 311 ayat 1), lebih subsidiar (pasal 310 ayat 2) namun dalam keterangan terdakwa, terdakwa menolak semua dakwaan karena bahwa pengaduan terdakwa kepada kepada kejaksaan negeri bandung adalah benar dan tidak palsu, karena Naga Budiman merasa dirugikan sehubungan dengan 3 lembar Giro bilyet sebesar Rp 7.182.000,00 oleh saksi Benny S. Indradjaja dan uangnya telah dicairkan dengan cara dimasukkan kedalam AC no. 4060 atas nama Benny S. Indradjaja.

c) Dakwaan

1) PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Naga Budiman pada tanggal 15 November 1982 atau setidaknya pada suatu lain masih dalam tahun 1982 bertempat di PT.Ganatex Jl. Moch. Toha Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yakni ia terdakwa Naga Budiman telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu ke kantor Kejaksaan Negeri Bandung dengan

surat tertanggal 15 November 1982 yang kemudian tembusannya telah dikirim ke Instansi lain diantaranya kepada :

- (a) Yth, Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.
- (b) Yth, Bapak Jaksa Agung Ismail Saleh S.H.
- (c) Yth, Bapak Pangkopkamtib Laksamana TNI Sudomo.
- (d) Yth, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Djamin.
- (e) Yth, Bapak Panglima VI/ Siliwangi Mayjen TNI Yogie S.H.
- (f) Yth, Bapak Kadapol VIII Jabar Langlang Buana.
- (g) Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Bandung.
- (h) Yth, Bapak Pimpinan Satuan Reserse Bandung.
- (i) Yth, PT. LINSEA Inc.Jakarta/Bandung
- (j) Yth, Bapak Drs. Capelene, Jakarta.
- (k) Yth, Bapak Direktur Rohm and Haas Asia, Jakarta.
- (l) Yth, Bapak PT. Francolor (PT.Invertraco) Jakarta.
- (m)Yth, Bapak Direktur Hakatex Bandung.
- (n) Yth, Bapak Yap Thiam Hien SH Jakarta.
- (o) Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- (p) Yth, Ny. Amartiwi M.Saleh SH Bandung.

Yang antara lain isi dari surat tersebut telah menjelek-jelekkan nama baik dan telah menuduh telah melakukan tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan karyawan dari PT. Ganatex yang maksudnya ditujukan kepada saksi Benny S. Indradjaja, sehingga dengan adanya surat-surat yang telah disebar luaskan tersebut telah memfitnah dengan surat dan telah mencemarkan nama baik dari saksi Benny S. Indradjaja ataupun merasa dirugikan dalam bidang perdagangan yang telah mengurangi rasa kepercayaan dari pada orang lain tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 317 (1) dari KUHP.

2) SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Naga Budiman pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan primair tersebut diatas, dengan sengaja telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, yakni terdakwa telah mencemarkan nama baik atau memfitnah dari saksi Benny S. Indradjaja dengan cara telah menyebarluaskan surat yang antara lain isinya telah menjelek-jelekkan nama baik dan telah menuduh bahwa saksi Benny S. Indradjaja telah melakukan korupsi yang bekerja sama dengan karyawan PT.Ganatex, tuduhan tersebut telah disebar luaskan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Jl.L.R.E. Martadinata Bandung tertanggal 15 November 1982 yang kemudian tembusannya telah dikirim ke Instansi lain sebanyak kurang lebih 16 Instansi diantaranya kepada PT. LINSEA Inc.Jakarta/Bandung sebagai tempat saksi Benny S. Indradjaja bekerja dan kepada PT.Hakatex sebagai karyawan pembantu dalam bidang teknis, sehingga dengan adanya surat yang telah dikirim tersebut maka saksi Benny S. Indradjaja telah merasa tercemar dan difitnah dan merasa dirugikan dalam bidang perdagangan yang telah mengurangi rasa kepercayaan diri pada orang lain terhadap saksi Benny S. Indradjaja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut pasal 311 (1) dari KUHP.

3) LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Naga Budiman pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang dilakukan dengan tulisan yang disiarkan, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, yakni ia terdakwa

telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi bernama Benny S. Indradjaja dengan cara telah menuduh melakukan tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan karyawan PT. Ganatex dan telah menjelek-jelekkan nama baik dari saksi Benny S. Indradjaja yang diketahui oleh umum yaitu dengan telah mengirim surat yang aslinya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 15 November 1982 kemudian tembusannya sebanyak 16 lembar telah dikirimkan kepada Instansi lain dan diantaranya dikirim kepada PT. LINSEA Inc.Jakarta / Bandung dan PT. Hakatex dimana saksi Benny S. Indradjaja sebagai karyawan dikantor tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut saksi Benny S. Indradjaja telah merasa malu dan terserang kehormatannya atau nama baiknya dan mengakibatkan telah mengurangi rasa kepercayaan baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang kepegawaiannya mengenai pandangan dari orang lain terhadap saksi Benny S. Indradjaja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 310 (2) KUHP.

d) Keterangan saksi

- 1) Bahwa saksi I Benny S. Indradjaja menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - (a) Bahwa benar saksi pada bulan April 1982 telah melaporkan oleh terdakwa kepada yang berwajib dengan tuduhan saksi Benny S. Indradjaja telah melakukan korupsi di PT. Ganatex
 - (b) Bahwa benar pada tanggal 15 November 1982 sebagai kelanjutan laporan tersebut diatas, terdakwa telah membuat surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Bandung disertai tembusan kepada beberapa Instansi Pemeintah dan lain-lain
 - (c) Bahwa atas laporan tersebut, kemudian saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian

- (d) Bahwa pada tanggal 16 November 1982 saksi datang ke Kantor POLTABES Bandung menanyakan hasil pemeriksaan atas diri saksi, kemudian dijawab oleh POLTABES Bandung bahwa perkara yang menyangkut saksi tidak dapat dilanjutkan dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti
 - (e) Bahwa dengan adanya laporan tersebut saksi merasa difitnah, kemudian pada tanggal 9 Desember 1982 saksi membuat laporan pengaduan kepada POLTABES Bandung
 - (f) Bahwa sebagai akibat laporan dari terdakwa itu, saksi merasa nama baiknya dicemarkan, yang selain itu atasan dan relasi saksi tidak percaya lagi
- 2) Bahwa saksi II bernama Kusnadi hakadinata menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- (a) Bahwa saksi kenal kepada terdakwa karena ada hubungan dagang
 - (b) Bahwa pada suatu ketika saksi pernah menerima telepon dari terdakwa yang isinya mengingatkan kepada saksi agar berhati-hati terhadap saksi Benny S. Indradjaja sebab telah menyeleweng di PT. Ganatex
 - (c) Bahwa keesokan harinya saksi pernah menerima surat dari terdakwa yang isinya menjelek-jelekkan saksi Benny S. Indradjaja
 - (d) Bahwa setelah saksi telah menerima surat tersebut, kemudian saksi Benny S. Indradjaja berhenti atas kemauannya sendiri sebagai karyawan perusahaan yang dipimpin oleh saksi
- 3) Bahwa saksi III bernama Kasmuni menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- (a) Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Benny S. Indradjaja, yaitu sehubungan dengan adanya pengaduan dari terdakwa atas diri saksi Benny S. Indradjaja

- (b) Bahwa pengaduan tersebut ditangani oleh POLTABES Bandung yang isinya menuduh saksi Benny S. Indradjaja telah melakukan penyelewengan di PT. Ganatex milik terdakwa dengan bekerja sama karyawan PT. Ganatex
 - (c) Bahwa oleh karena pengaduan tersebut bukti-buktinya tidak lengkap, maka pengaduan tersebut oleh POLTABES Bandung tidak dilanjutkan
 - (d) Bahwa hasil penerimaan tersebut oleh saksi diteruskan kepada komandan saksi kemudian saksi pernah mendengar dari Lettu Saman Suharjo bahwa berkas perkaranya telah dikirimkan ke KAPOLDA
- 4) Bahwa saksi *a de charge* pertama bernama J. Windha menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- (a) Bahwa pada waktu saksi membuat B.A.P atas diri saksi Kusnadi, dilakukan dikantor saksi Kusnadi dengan membawa mesin tik sendiri
 - (b) Bahwa sebelum B.A.P. ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh saksi Kusnadi
 - (c) Bahwa alasan saksi membuat B.A.P dikantor saksi Kusnadi ialah karena saksi Kusnadi selaku Direktur tidak dapat meninggalkan tugasnya
- 5) Bahwa saksi *a de charge* kedua bernama Markus Hartanto menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- (a) Bahwa saksi kenal kepada terdakwa dan kepada saksi Benny S. Indradjaja
 - (b) Bahwa benar saksi secara lisan telah mengangkat saksi Benny S. Indradjaja sebagai perwakilan PT. LINSEA Cabang Bandung
 - (c) Bahwa saksi mengetahui saksi Benny S. Indradjaja diberi hak bertindak keluar bilamana atas nama perusahaan

- (d) Bahwa alasan saksi memberhentikan untuk sementara atas diri Benny S. Indradjaja dari jabatannya ialah untuk menjernihkan suasana antara terdakwa dengan saksi Benny S. Indradjaja
- (e) Bahwa saksi pernah menerima surat dari terdakwa yang isinya menyangkut diri saksi Benny S. Indradjaja

e) Keterangan terdakwa

Bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa menolak semua dakwaan
- 2) Bahwa pengaduan terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 15 November 1982 adalah benar dan tidak palsu, sebab terdakwa merasa dirugikan sehubungan dengan tiga lembar Giro Bilyet sebesar Rp 7.182.000,00 oleh saksi Benny S. Indradjaja telah dicairkan sedangkan uangnya dimiliki olehnya dengan cara dimasukkan ke dalam AC No.4060 atas nama pribadi saksi Benny S. Indradjaja.
- 3) Bahwa alasan terdakwa membuat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Bandung ialah karena laporan terdakwa kepada Poltabes Bandung tidak ditanggapi
- 4) Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Kasmuni tentang pengaduan terdakwa kepada Poltabes Bandung, dijawab oleh saksi Kasmuni bahwa berkas pengaduannya hilang
- 5) Bahwa demikian pula terdakwa pernah menanyakan kepada atasan saksi Kasmuni tentang berkas pengaduan, dijawab bahwa berkas pengaduan telah dikirimkan ke Kapolda, akan tetapi setelah terdakwa menanyakan kepada Kapolda tentang pengaduan itu dijawab oleh Kapolda bahwa berkas pengaduan telah dilimpahkan lagi kepada Poltabes Bandung, dan terakhir terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Kasmuni namun jawabannya bahwa berkas pengaduannya telah hilang
- 6) Bahwa terdakwa pernah mengirim tembusan surat pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I., Jaksa Agung R.I,

Pangkoptantib, Kapolri, Pangdam VI Siliwangi, Kadapol VIII Langlang Buana, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Pimpinan Satserse Bandung, PT. Linsea Inc. Jakarta, Drs. Capella Jakarta, Direktur Rohm and Haas Asia Jakarta, PT. Francolor, Direktur Hakatex Bandung, Yap Thiam Hien, Pengadilan Negeri Bandung dan Ny. Amartiwi M. Saleh SH.

- 7) Bahwa maksud terdakwa mengirim tembusan surat pengaduan kepada Ny. Amartiwi M. Saleh, SH ialah karena ada hubungan perkara, sedangkan kepada Yap Thiam Hien, karena ada hubungan dengan PT. Ganatex dan kepada PT. Linsea Inc. yaitu dalam hal hubungan kerja sama, tegasnya karena ada hubungan perkara dan hubungan dagang
- 8) Bahwa menurut terdakwa uraian lebih lanjut tentang alasan dikirimkannya tembusan surat pengaduan kepada 16 pejabat Pemerintah maupun swasta akan dimuat dalam pembelaan
- 9) Perjanjian hutang piutang antara saksi Benny S. Indradjaja dengan Neneng Budiman adalah tidak benar
- 10) Bahwa Selain itu terdakwa dipaksa oleh saksi Benny S. Indradjaja menyerahkan Giro Bilyet semuanya bernilai Rp. 25.000.000,00
- 11) Bahwa terdakwa mengakui bahwa PT. Ganatex berhutang kepada PT. Linsea Inc. sebesar Rp. 55.612.690,75 akan tetapi dengan adanya ulah dari saksi Benny S. Indradjaja, maka menurut terdakwa hutang PT. Ganatex itu menjadi sebesar Rp. 227.391.653,25

f) Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah melanggar pasal 317 (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana berupa penjara selama satu tahun.
- 3) Menyatakan supaya terdakwa ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti dilampirkan dalam berkas.

- 5) Menentukan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

g) Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor.4/84/PID/B/08.04/BDG yang amarnya berbunyi :

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa bernama : Naga Budiman, umur 52 tahun, dilahirkan di Bandung, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di jalan pasirkaliki no.52 Bandung, agama Kristen, Pekerjaan Dagang
Secara syah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan-dakwaan PRIMAIR, SUBSIDIAR, dan LEBIH SUBSIDIAR
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan PRIMAIR, SUBSIDIAR, LEBIH SUBSIDIAR
- 3) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara
- 4) Menetapkan terdakwa direhabilitasi
- 5) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat tertanggal 15 November 1982 No.46/XI/82 dan surat-surat P-1 sampai dengan P-34 tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

h) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan *Judex Factie*

Kasus putusan Nomer 607/K/Pid/1985 merupakan proses persidangan lanjutan hasil kasasi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomer 4/84/PID/08.04/BDG. Sebelum melakukan analisis yuridis *ratio decidendi*, berikut kronologis permasalahan kasus tersebut.

1) Proses persidangan Pengadilan Negeri Bandung

Pada persidangan Pengadilan Negeri Bandung mengadili perkara pidana dengan terdakwa Naga Budiman. Terdakwa Naga Budiman diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan primair membuat pengaduan palsu yang dianggap melanggar pasal 317

KUHPidana, subsidair Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dan lebih subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa dituntut hukuman penjara selama 1 tahun. Berdasarkan hasil persidangan, hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan yang intinya bahwa berdasar atas keyakinan dan bukti yang sah, terdakwa (Naga Budiman) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, atau lebih subsidair. Pengadilan Negeri Bandung kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

2) Proses pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung

Ratio decidendi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomer 4/84/PID/B/08.04/BDG, adalah:

a) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan primair.

Pada dakwaan primair, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa terdakwa Naga Budiman memenuhi unsur barangsiapa dan perbuatan sengaja, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Namun hakim menyatakan bahwa surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu tersebut tidak terpenuhi karena laporan Naga Budiman baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan masih dalam proses, sehingga tuntutan pengaduan atas pemberitahuan palsu yang dianggap sebagai pencemaran nama baik masih dianggap terlalu pagi.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaannya mengesampingkan proses pemeriksaan terhadap pengaduan yang belum selesai dilakukan baik dari lembaga Kepolisian

maupun Kejaksaan, sehingga hasil pemeriksaan Mahkamah Agung dalam dakwaan primair menyatakan bahwa terdakwa tetap dianggap melanggar bunyi Pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Di mana dalam hasil pemeriksaan tersebut terdakwa Naga Budiman dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang Benny S. Indradjaja sehingga kehormatan yang bersangkutan terserang.

- b) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan subsidair

Pada putusan Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan dakwaan subsidair di mana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur memfitnah adalah:

- (1) Seseorang melakukan tindak pidana menista atau menista dengan tulisan
- (2) Dalam hal diijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya, terdakwa tidak dapat membuktikannya.
- (3) Bahwa tuduhan itu diketahuinya tidak benar

Unsur tuduhan yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah menista dengan tulisan dan oleh karena sebagaimana salah satu unsur pasal 310 ayat (2) dianggap tidak terpenuhi, maka salah satu unsur pasal 311 KUHP tersebut otomatis tidak terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Hasil pemeriksaan dakwaan subsidair Pengadilan Negeri Bandung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah:

Bahwa ia terdakwa Naga Budiman pada waktu dan ditempat sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan primair tersebut di atas, dengan sengaja telah melakukan kejahatan

pencemaran atau pencemaran tertulis, yakni ia terdakwa telah mencemarkan nama baik atau memfitnah dari saksi Benny S. Indradjaja dengan cara telah menyebarluaskan surat yang antara lain isinya telah menjelek-jelekkan nama baik dan telah menuduh bahwa saksi Benny S. Indradjaja telah melakukan korupsi yang bekerjasama dengan karyawan PT. Ganatex, tuduhan tersebut telah disebarluaskan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Jl. L.R.E. Martadinata Bandung tertanggal 15 Nopember 1982 yang kemudian tembusannya telah dikirim instansi lain sebanyak kurang lebih 16 instansi diantaranya kepada PT. Linsea Inc. Jakarta/Bandung sebagai tempat saksi Benny S. Indradjaja bekerja dan kepada PT. Hakatex sebagai karyawan pembantu dalam bidang teknis, sehingga dengan adanya surat yang telah dikirim tersebut maka saksi Benny S. Indradjaja telah merasa tercemar dan difitnah dan merasa dirugikan dalam bidang perdagangan yang telah mengurangi rasa kepercayaan dari orang lain terhadap saksi Benny S. Indradjaja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut bunyi pasal 311 (1) dari KUHP yaitu ” barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

- c) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan lebih subsidair

Pada putusan Pengadilan Negeri Bandung atas dakwaan subsidair, majelis berpendapat bahwa oleh karena sebenarnya pasal tersebut merupakan kelanjutan dari tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan (2) sedangkan dalam dakwaan lebih subsidair

terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (2), maka majelis membahas dakwaan lebih subsidair terlebih dahulu. Adapun pertimbangan majelis dalam dakwaan lebih subsidair sebagaimana Pasal 310 KUHPidana terdakwa dianggap melakukan penghinaan yang termasuk dalam rumusan kata "menista".

Majelis Pengadilan Negeri Bandung menganggap antara Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tidak dapat dipisahkan, maka unsur-unsur yang esensial sebagaimana dalam pasal tersebut,

- (1) barangsiapa = terpenuhi
- (2) dengan sengaja = terpenuhi
- (3) menyerang kehormatan/ nama baik seseorang = terpenuhi
- (4) menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu = terpenuhi
- (5) dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut = tidak terpenuhi

Pada evaluasi "dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut", menurut Pengadilan Negeri Bandung meskipun pengaduan tersebut dikirimkan kepada perorangan atau badan swasta tertentu, tetapi karena perorangan atau badan swasta tersebut tidak mempunyai kewenangan menyebarluaskan tembusan pengaduan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan inilah majelis Pengadilan Negeri Bandung menyatakan salah satu unsur Pasal 310 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair.

Hasil pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung terhadap dakwaan lebih subsidair adalah:

- (1) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menafsirkan pasal 317 ayat (1) KUHP dalam unsur ke 3 mengenai

memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pembesar negeri, di mana dalam pertimbangannya karena surat tertanggal 15 Nopember 1982 yang dikirim terdakwa pada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, tidak dikembalikan pada terdakwa dengan memberi petunjuk seperlunya pada terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Bandung.

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut tidaklah relevant, karena walaupun Kepala Kejaksaan Negeri membalas surat tersebut pada terdakwa, jelas terdakwa telah membuat / mengirim surat tersebut yang isinya sama sekali tidak benar/ palsu karena hal tersebut sudah disangkal oleh saksi Benny S. Indradjaja melalui Pemohon Kasasi sebagai Penuntut Umum dan juga telah dijawab apa yang didakwakan pada saksi Benny S. Indradjaja tidak benar. Bahwa sebaliknya terdakwalah yang telah banyak melakukan tindak pidana Penipuan terhadap orang lain, sehingga untuk melepaskan tanggungjawabnya terdakwa telah mendakwa para karyawan melakukan penyelewengan dalam Perusahaan PT. Ganatex hal ini dapat dilihat dalam:

- i. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 26/83 Pidana/B/09-03 Bandung jo putusan Mahkamah Agung No. 3833/TU/653K/Pid/1984 terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 5 bulan
- ii. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 17/83 Pidana/B/24/Bdg dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung terdakwa dihukum penjara 1 tahun terdakwa masih kasasi.

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung dengan adanya surat tertanggal 15 Nopember 1982 yang ditujukan kepada

Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, dianggap masih terlalu pagi untuk dapat disebut pengaduan palsu.

Menurut pemohon kasasi hal tersebut tidak benar, sebab isi surat tersebut oleh saksi Benny S. Indradjaja telah dibantah dipersidangan dan diajukan bukti-bukti tambahan, namun Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan keterangan saksi Benny S. Indradjaja dan alat-alat bukti tambahan yang diajukan saksi Benny S. Indradjaja.

- (2) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menafsirkan pengertian pasal 310 ayat (2) KUHP yakni dalam unsur dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut (unsur ke 5) di mana menurut Pengadilan Negeri surat tanggal 15 Nopember 1982 dan tembusannya sebanyak 16 lembar, dikirimkan pada instansi pemerintah dan instansi sipil hanyalah untuk diketahui saja, pertimbangan semacam itu adalah keliru sekali.

Bahwa dengan dibuatnya surat tertanggal 15 Nopember 1982 oleh terdakwa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan tembusannya sebanyak 16 lembar dikirimkan ke instansi-instansi pemerintah dan sipil, maka di sini terdakwa telah mempunyai niat atau harus dapat menduga surat/ tulisan akan dapat dibawa oleh orang banyak, apakah yang dikirim itu instansi pemerintah/ sipil bukan merupakan persoalan, yang jelas surat/tulisan harus berjumlah banyak supaya bisa dibaca oleh orang banyak menurut Pemohon Kasasi unsur tersebut di atas sudah dapat dipenuhi.

- (3) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 311 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana

termuat dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu menista dengan tulisan, sedangkan salah satu unsur pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, dianggap tidak terpenuhi sedangkan menurut hemat Pemohon Kasasi, unsur dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut (unsur ke 5) sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya semua unsur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi.

Mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Jaksa dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang tidak murni, sebab putusan tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru mengenai perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, di mana Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pengaduan yang dibuat terdakwa baik yang diajukan ke Poltabes Bandung maupun yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Bandung atas diri Benny S. Indradjaja belum dapat dikatakan pengaduan palsu sebab pengaduan tersebut belum ada yang sampai ke Pengadilan, hal mana merupakan penafsiran yang keliru atas sebutan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena untuk adanya pengaduan palsu tidak harus Kepolisian atau Kejaksaan (telah) meneruskan perkara yang diajukan terdakwa tersebut ke Pengadilan.

B. Implikasi Putusan *Judex Factie* Yang Dibatalkan Hakim Mahkamah Agung Karena Tidak Memuat Surat Dakwaan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil putusan *Judex Factie* yang dibatalkan Hakim Mahkamah Agung berimplikasi pada :

a) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung

Turunnya putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung No.4/84/Pid/B/08.04/Bdg. menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

b) Pada Terdakwa

Atas turunnya putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

c) Jaksa

Atas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut Kejaksaan menang sebagai pemohon kasasi dan mampu membuktikan bahwa terdakwa Naga Budiman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengadu secara menfitnah.

C. Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan *Judex Factie* yang tidak Memuat Surat Dakwaan

Berdasarkan uraian di atas, *ratio decidenci* pemeriksaan kasasi dalam Putusan Nomer 607/K/Pid/1985, Mahkamah Agung hanya sebatas tuntutan sebagaimana dalam dakwaan semata. Hal tersebut berbeda dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang diuraikan secara terperinci berdasarkan unsur-unsur terpenuhi dalam masing-masing pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung hanya melakukan adanya pencemaran nama baik sebagai perilaku tindak pidana yang harus menerima hukuman.

Mahkamah Agung mengabaikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung yang menyebutkan bahwa peradilan terhadap pencemaran nama baik yang diajukan oleh Benny S. Indradjaja terhadap terdakwa Naga Budiman masih terlalu dini. Adapun pertimbangan tersebut adalah bahwa proses hukum terhadap pengaduan tindak pidana penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Benny S. Indradjaja masih dalam proses penyelidikan dari pihak Kepolisian. Pada proses ini belum ada keputusan secara hukum yang mengikat berkaitan dengan kelanjutan pengaduan Naga Budiman tersebut.

Proses pengaduan tindak pengaduan pencemaran nama baik seharusnya dilakukan apabila proses pengaduan penyelewengan dana dalam PT. Ganatex tersebut telah memperoleh keputusan hukum yang mengikat. Apabila dalam proses tersebut ternyata kelengkapan berkas untuk di Pengadilan tidak dapat dipenuhi, tentu pihak Kepolisian akan menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3). Hal inilah yang mestinya menjadi bahan pertimbangan atau *rasio decidendi* Mahkamah Agung dalam kasus Kasasi Putusan Nomer 607/K/Pid/1985.

2. Implikasi Putusan *Judex Factie* Yang Dibatalkan Hakim Mahkamah Agung Karena Tidak Memuat Surat Dakwaan

Berdasarkan hasil analisis implikasi putusan *Judex Factie* diatas ada tiga lembaga yang memiliki kompetensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung No.4/84/Pid/B/08.04/Bdg. yakni Lembaga Pengadilan Negeri individu terdakwa dan Kejaksaan berikut pembahasannya :

a) Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan hasil penelitian diatas pembatalan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung oleh Mahkamah Agung merupakan ketetapan yang dilakukan berdasarkan adanya pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung yang tidak memuat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197

ayat (1 c yo pasal 143) KUHAP dan tidak ternyata bahwa hal itu disebabkan karena adanya kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, sehingga berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah batal demi hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut menimbang, bahwa terdakwa didakwa Primair melanggar pasal 317 (1) KUHP yang unsur-unsurnya Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pembesar Negeri, menyebabkan kehormatan atau nama baik seseorang terserang.

Bahwa didepan persidangan telah terungkap bahwa terdakwa pernah membuat surat pengaduan ke Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 15 Nopember 1982, atas diri saksi Benny S. Indradjaja yang menurut terdakwa saksi tersebut melakukan penyelewengan di PT. Ganatex yang dipimpin terdakwa. Bahwa alasan terdakwa membuat surat ke Kejaksaan tersebut karena pengaduannya ke Poltabes Bandung tidak dianggap. Bahwa dengan dibuatnya surat Kejaksaan Negeri Bandung tersebut terdakwa mempunyai maksud untuk melaporkan kepada yang berwajib tentang pembuatan saksi Benny S.Indradjaja di PT. Ganatex, yang ternyata pengaduan tersebut tidak benar/palsu.

Bahwa selain ke Kejaksaan juga mengirimkan tembusan-tembusan surat tersebut ke Instansi-Instansi lain, yang mengakibatkan saksi Benny S.Indrajaja terserang kehormatannya atau nama baiknya.

b) Pada Terdakwa

Kembalinya putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam proses kasasi tersebut menempatkan posisi terdakwa kembali kepada status tersangka. Kondisi ini memberikan kepastian hukum bahwa Naga Budiman harus menjalani sangsi pidana penjara selama 6 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwasannya persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang memutus bebas tidak memiliki kekuatan hukum setelah turunnya *Judex Factie*.

c) Jaksa

Langkah kasasi yang dilakukan oleh jaksa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung merupakan proses penegakkan hukum yang dilakukan secara cermat dan cerdas. Kedudukan jaksa yang harus dapat mengungkap kebenaran dalam persidangan telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Bandung dalam mencari kepastian hukum atas terdakwa yang diputus bebas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. *Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan, meliputi:
 - a) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan primair
 - b) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan subsidair
 - c) Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan lebih subsidair, hasil pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung terhadap dakwaan lebih subsidair yaitu :
 - 1) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menafsirkan pasal 317 ayat (1) KUHP dalam unsur ke 3 mengenai memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pembesar negeri, dimana dalam pertimbangannya karena surat tertanggal 15 November 1982 yang dikirim terdakwa pada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung tidak dikembalikan pada terdakwa dengan memberi petunjuk seperlunya pada terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Bandung
 - 2) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menafsirkan pengertian pasal 310 ayat (2) KUHP yakni dalam unsur dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut (unsur ke 5) dimana menurut Pengadilan Negeri surat tanggal 15 November 1982 dan tembusannya sebanyak 16 lembar, dikirimkan pada instansi pemerintah dan instansi sipil hanyalah untuk diketahui saja, pertimbangan semacam itu keliru sekali

- 3) Bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 311 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana termuat dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu menista dengan tulisan, sedangkan salah satu unsur pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana dipertimbangkan diatas dianggap tidak terpenuhi sedangkan menurut Pemohon Kasasi, unsur dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut (unsur ke 5) sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya semua unsur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi
2. Implikasi putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim Mahkamah Agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik. Hal ini akibat adanya pembatalan demi hukum atas Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Nomer 607/K/Pid/1985.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut yaitu hendaknya Pengadilan Negeri Bandung lebih teliti dalam memahami penafsiran terhadap pasal-pasal yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga majelis memiliki argumentasi yang kuat dalam membuat suatu keputusan meskipun harus menafsirkan dan Mahkamah Agung memiliki kesaksamaan dan keselarasan terhadap kasus yang dihadapi dalam mengkontruksi putusan sehingga logis dapat diterima berbagai kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Djambatan.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayu Media Publising

Lexy J. Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Harun M.Husein, 1994. *Surat Dakwaan*. Jakarta. PT Rineka Cipta

M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Pustaka Kartini.

Peter Mahmud marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, 2007: 212-220

R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor, Tanpa Pengarang. 1999. *KUHAP Lengkap*. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pid/1985

Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wibesite dan Internet

mail.kaskus.us/showthread.php?t=912738

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, “*Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*”, www.hukumonline.com tanggal 30 Mei 2005.

Brian Prastyo, “*Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*”,
<http://staff.blog.ui.edu>.

Diah Lestari.P. dan Theodora YSP (Divisi Riset MaPPI FHUI), “*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*”, <http://www.pemantauperadilan.com>, tanggal 7 Desember 2005;